

**MODUL**  
**KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA ORDE**  
**BARU SAMPAI REFORMASI**  
**MATERI : KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA MASA**  
**ORDE BARU SAMPAI REFORMASI**



**MOCH. ARIFIEN**

**PPG DALAM JABATAN**  
**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**2018**

## A. Pendahuluan

Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Pemerintahan Soeharto sendiri bertahan selama 32 tahun dengan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mencapai cita-cita bangsa. Pada era ini pemerintahan Soeharto banyak memfokuskan pembangunan pada bidang perekonomian dan penguatan Pancasila. Soeharto kemudian mengundurkan diri pada tahun 1998 akibat pergerakan rakyat yang kemudian dikenal dengan gerakan reformasi. Reformasi merupakan gerakan yang dilakukan oleh rakyat bersama dengan mahasiswa untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Puncak pimpinan berganti ke tangan B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri pasca gerakan reformasi.

Modul ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Pendahuluan; Capaian pembelajaran; Materi; Rangkuman; Tugas, Tes dan Daftar Pustaka. Proses pembelajaran untuk materi kehidupan sosial, ekonomi, politik masa orde baru sampai reformasi yang sedang anda ikuti saat ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut ini:

1. Pahami dulu mengenai berbagai kegiatan penting dalam modul mulai tahap awal sampai akhir.
2. Lakukan kajian terhadap materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa orde baru hingga reformasi terlebih dahulu agar anda mendapat mendapat mengkonstruksi pengetahuan lebih detail.
3. Pelajari terlebih dahulu kegiatan belajar yang akan dilakukan.
4. Keberhasilan proses belajar Anda dalam mata diklat ini sangat bergantung kepada kesungguhan Anda dalam mengerjakan latihan. Untuk itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat.
5. Bila anda menemui kesulitan, silahkan hubungi instruktur/ widiaswara pembimbing atau fasilitator yang mengajar modul ini.

Baiklah saudara pengguna modul, selamat belajar, semoga anda sukses memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal anda bertugas dengan baik.

## **B. Capaian Pembelajaran**

Capaian pembelajaran yang akan anda dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah anda mampu menjelaskan kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada masa orde baru sampai reformasi.

## **C. Sub Capaian Pembelajaran**

Setelah anda mempelajari modul ini maka ada diharapkan akan memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan kehidupan politik masa orde baru sampai reformasi

## **D. Materi**

### **Kehidupan politik masa orde baru sampai reformasi**

Peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang terjadi di Jakarta menyebabkan stabilitas sosial dan politik Indonesia pada tingkat yang mengkhawatirkan. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau, keadaan perekonomian makin memburuk dimana inflasi yang cukup tinggi terhadap pelaku G30S PKI semakin meningkat. Pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR rakyat mengajukan tuntutan “TRITURA” (Tiga Tuntutan Rakyat) yang berisi : (1) Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya, (2) Pembersihan Kabinet Dwikora, (3) Penurunan Harga-harga barang.

Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang berkejolak tidak juga berhasil. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan Negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jendral Soeharto, ini merupakan langkah awal kemunculan pemerintahan Orde Baru. Meskipun Supersemar tersebut hingga kini masih menimbulkan kontroversi bagi masyarakat Indonesia, menurut beberapa ahli sejarah hal disebabkan karena munculnya tiga versi supersemar yang berbeda. Dalam Supersemar terdapat 3 poin tugas utama: (1) Presiden/Panglima tertinggi ABRI/pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, mengambil tindakan yang dianggap perlu agar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi keutuhan bangsa dan negara, (2)

Pengkoordinasian panglima angkatan lain, (3) Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap segala yang berhubungan dengan poin kedua.

Supersemar oleh beberapa pihak dianggap sebagai bentuk alih kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan negara dari berbagai polemik yang ada saat itu. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968. Pengukuhan tersebut menandakan dimulainya era orde baru di Indonesia dan berakhirnya kekuasaan orde lama oleh Soekarno.



Gambar 5. Tiga versi Supersemar

Sumber : <https://bit.ly/2FcwEqH>

Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, yang dilakukan oleh Orde Baru adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup, meskipun Orde Baru sering mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila hanya ditafsirkan dari satu versi saja, yakni pemerintah. Pemerintah Orde Baru memiliki BP-7 yang bertugas memahami Pancasila secara “benar”, menafsirkan secara benar dan menyampaikan tafsiran tersebut kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat harus pernah mengikuti penataran P4 dan memperoleh sertifikat sebagai syarat dalam mencari pekerjaan, melanjutkan studi, kenaikan pangkat dan golongan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya ideologi yang seolah-olah ideologi lain bisa dimasukkan ke dalam Pancasila. Organisasi apapun harus berasaskan Pancasila, jika tidak akan dijebloskan ke penjara. Selama Orde Baru juga terjadi indoktrinasi Pancasila secara intens yang bersifat berlebihan dan membosankan. Meskipun demikian masyarakat tidak berani untuk menentang, karena takut dianggap tidak Pancasila dan dapat ditangkap.

Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI. Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Sejak berkuasa pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Usaha-usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Semuanya harus kembali berlandaskan penerapan semurni-murninya Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut berkaitan erat dengan komunisme yang dianggap sebagai akar permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun-tahun pertama Orde Baru. Penerapan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa, tak pelak menjadi salah satu cara membangun citra pemerintahan yang anti dan bersih dari komunisme.

Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma (Soekarno masih menjadi presiden dan Soeharto sebagai ketua presidium kabinet). Tugas utama kabinet AMPERA yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA disebut Catur Karya Kabinet AMPERA. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (*security approach*), termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970).



Gambar 6. Pengumuman kabinet Ampera

Sumber : <https://bit.ly/2qVxx2A>

Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. Program kerja kabinet pancakrida ini antara lain : (1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, (2) Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), (3) Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan No. XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya 5 Juli 1971), (4) Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan, (5) Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara.

Antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda sama-sama menggunakan sistem “ *Political and Role Sharing dan Partnership* (hubungan kemitraan) antara sipil dan militer”. Perbedaannya hanya terletak pada dasar legitimasinya<sup>4</sup>, terbukti bahwa presiden Soeharto memegang kekuasaan Eksekutif sebagai hasil dari pemilihan MPRS dan MPR sejak tahun 1973. Kekuasaan Eksekutif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia tertulis dalam UUD 1945 pasal 5, berbunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan kata lain Presiden memegang kekuasaan Eksekutif dan Legislatif sekaligus

Empat tahun setelah resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI, Soeharto menggelar pemilu pada 5 Juli 1971. Hajatan politik nasional itu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Ini pemilu pertama pada masa Orde Baru. Total ada 10 partai politik yang bertarung kali ini dan hanya delapan parpol yang meraih kursi. Muncul dua partai baru, yaitu Golongan Karya (Golkar) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Beberapa parpol pada Pemilu 1955 tak lagi ikut serta karena dibubarkan, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Golkar menang dengan mengantongi 62,8 persen suara (236 kursi DPR). Disusul Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,6 persen suara (58 kursi), Parmusi dengan 5,3 persen suara (24 kursi), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dengan 6,9 persen suara (20 kursi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan 2,3 persen suara (10 kursi).

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu: (1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam seperti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam), (2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis), (3) Golongan Karya (Golkar).



Gambar 7. Partai pada masa orde baru

Sumber : <https://bit.ly/2Hqg0pF>

Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana

terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap pertanggung-jawaban, Rancangan Undang-Undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.

Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat. Pada era orde baru ini pula Irian Barat kembali secara penuh ke Indonesia. Berdasarkan isi dari Persetujuan New York pada tahun 1962 antara Indonesia-Belanda mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia maka diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat.

Pada tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.

Di bawah Soeharto pula, Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada tanggal 5 Agustus 1967, berawal dari lima negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand mengadakan pertemuan (Konferensi) di Kota Bangkok. Konferensi tersebut menghasilkan suatu persetujuan yang disebut dengan Persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN adalah organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.





Gambar 8 Para pendiri ASEAN

Sumber : <https://bit.ly/2HXceoK>

Pemerintah juga saat itu menjalankan program Dwi Fungsi ABRI dalam praktek kehidupan sosial politik. Militer adalah suatu alat pertahanan negara sebenarnya telah mempunyai konsep yang baik dalam perannya menjaga stabilitas Politik dan keamanan di dalam negeri, yaitu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik mereka di negeri ini. Dwi Fungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar lingkungan ABRI adalah sebagai sebuah bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah.

Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program "Penembakan Misterius" (Petrus)

atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.



Gambar 9. Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR 1998

Sumber : <https://bit.ly/2qUPRYZ>

Agenda reformasi yang dituntut oleh mahasiswa saat itu ada enam, yakni : (1) Suksesi kepemimpinan nasional, (2) Amandemen terhadap UUD 1945, (3) Pemberantasan KKN, (4) Penghapusan Dwi fungsi ABRI, (5) Penegakan supermasi hukum, (6) Pelaksanaan otonomi daerah. Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, sebagai salah satu penguasa terlama di dunia, dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh MPR untuk masa jabatan yang ketujuh pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu akan berada di bawah kontrolnya. Tetapi dua bulan sesudah Soeharto mengucapkan sumpah, Orde Baru runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada tanggal 19 Mei 1998, presiden yang sudah

berumur 75 tahun ini menyaksikan legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorang diri.

<https://www.youtube.com/watch?v=5zU5hG6-FkE> (video gerakan mahasiswa tahun 1998)

Lahirnya era reformasi diawali oleh pergerakan rakyat yang didalamnya di dominasi oleh para mahasiswa yang menuntut ada perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik serta sosial budaya. Era reformasi di Indonesia merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dari tahun 1998 karena pemerintahan yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa Reformasi 98 dianggap sebagai salah satu peristiwa penting di Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut diantaranya ialah setelah adanya peristiwa Reformasi 1998, setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Setelah adanya peristiwa Reformasi 98, semua orang diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik, berserikat dan berkumpul. Sebelumnya pada masa pemerintah Orde Baru berkuasa, jumlah partai dibatasi hanya menjadi 3 partai saja (PDI, PPP, GOLKAR). Kegiatan berserikat serta berkumpul masa itu juga sangat dibatasi.

Soeharto memanipulasi eksistensi DPR/MPR untuk mengokohkan kekuasaan, akhirnya diberhentikan oleh lembaga yang sama lewat pernyataan pers tanggal 18 Mei 1998, oleh Ketua DPR Harmoko yang didampingi oleh Ismail Hasan Meutareum, Fatimah Achmad, Syarwan Hamid dan utusan daerah di depan wartawan dan mahasiswa menyampaikan pernyataan bahwa pimpinan Dewan baik ketua (Harmoko) maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Akhirnya pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Indonesia.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti monopoli, dan UU Anti korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.



Gambar 10. Pidato Pengunduran diri Soeharto

Sumber : <https://bit.ly/2FaHHAX>

Silahkan saksikan video di bawah ini mengenai pidato mundurnya soeharto.

<https://bit.ly/2HpEYZz>

Pidato pengunduran diri tersebut menandakan berakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Silahkan simak video berikut ini kelebihan dan kelemahan dari orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dari berbagai bidang kehidupan.

<https://bit.ly/2q7N5Qu>

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 telah mendorong munculnya berbagai macam perubahan dalam sistem ketatanegaraan, yang merupakan dampak dari adanya Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Tahun Presiden pasca reformasi. 1945 (UUD'45). Salah satu hasil dari perubahan dimaksud adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi memposisikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan karena dianggap tidak lagi *relevan* mengingat fakta bahwa tiga fungsi kekuasaan yang selama ini ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini kemudian mendorong negara membentuk

jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih *responsif* dalam mengatasi persoalan aktual negara dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Sejak era reformasi tahun 1998 dicanangkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan dua Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XI/MPR/Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara khusus, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penerapan prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga mengundang perdebatan hukum dan kontroversial, karena Mantan Presiden Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Dikalangan mahasiswa sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden terbagi atas tiga kelompok, yaitu: *pertama*, menolak Habibie karena merupakan produk Orde Baru; *kedua*, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara yang diterima semua kalangan sementara jabatan presiden tidak boleh kosong; *ketiga*, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah sah dan konstitusional. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Seiring dengan diumumkannya susunan kabinet yang baru, berarti presiden harus membubarkan Kabinet Pembangunan VII. Akhirnya gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan Era Reformasi mulai berjalan di Indonesia, di bawah Pemerintahan B.J. Habibie. Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 37 menteri, yang meliputi perwakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Tiga puluh tujuh menteri ini terdiri dari beberapa menteri departemen, menteri negara, sekretaris negara dan Jaksa Agung.

Beberapa kebijakan politik yang dibuat oleh presiden Habibie antara lain, memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan politik dan narapidana

politik pada masa Orde Baru lewat Keppres. Presiden Habibie juga melakukan perbaikan dalam hal partai politik, diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena pada masa Soeharto pembentukan partai politik sangat dibatasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan semua warga Indonesia untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran.

Mulai dari diberlakukannya UU tersebut, banyak terbentuk partai-partai politik. Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan kehakiman sebanyak 93 buah. Ada 48 partai diantaranya dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II pada bulan Juni 1999. Pemilu tahun 1999 berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber dan Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL (jujur dan adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu, juga netralitas birokrasi. Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu dilaksanakan. Dalam penghitungan suara dalam pemilu terjadi perdebatan panjang. Awalnya penghitungan suara diperkirakan selesai pada tanggal 21 Juni 1999, tapi tertunda sampai tanggal 16 Juli 1999. Hanya 17 dari 48 partai politik peserta pemilu yang bersedia menandatangani hasil pemilu dengan alasan kalau pemilu belum terlaksana dengan jujur dan adil. Penolakan tersebut ditunjukkan pada rapat pleno. Presiden menyerahkan hasil rapat pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).



Gambar 11. Partai Peserta Pemilu 1999



Sumber : <https://bit.ly/2vAtMEx>

Pada era presiden Habibie ini masalah timor-timor yang bergejolak juga diselesaikan, Masalah Timor-Timur terjadi bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan Dewanto. Situasi yang tidak aman di Tim-Tim memaksa ribuan penduduk mengungsi ke Timor Barat, ketidakmampuan Indonesia mencegah teror, menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan internasional, meskipun hasilnya berdasarkan referendum yang dilakukan oleh rakyat timor-timor memilih untuk merdeka dan berpisah dari Indonesia.

[https://www.youtube.com/watch?v=M81T5t\\_HB3g](https://www.youtube.com/watch?v=M81T5t_HB3g) (video pelaksanaan referendum di timor-timor).

Lepasnya timor-timor ini merupakan salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie dalam sidang umum MPR. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden B. J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya didepan Sidang umum MPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari sebelas fraksi, empat fraksi menolak, lima fraksi meminta penjelasan tambahan, satu fraksi menyerahkan sikap dan penilaiannya kepada Komisi Pertanggungjawaban Pidato Presiden dan satu fraksi menerima. Atas dasar penilaian itu, Ketua MPR Amien Rais memutuskan bahwa persoalan SU MPR akan dilakukan *votting*. Pada tanggal 19 Oktober, *votting* pun dilaksanakan dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil *votting* tersebut, Sidang Paripurna XII SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Habibie tampaknya belum memuaskan banyak pihak sehingga banyak anggota MPR/DPR yang di dalam Sidang Umum tahun 1999 menolak hasil pertanggungjawaban Habibie, Sehingga terjadi perubahan peta politik di mana Habibie mundur setelah pertanggungjawabannya ditolak. Akhirnya pencalonan pun terpecah menjadi 2 kubu yaitu Megawati yang dicalonkan PDI-P dan Gus Dur yang dijagokan oleh Poros Tengah. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden dalam sidang umum MPR 1999 memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Harapan besar itu pada umumnya bersumber dari keinginan kolektif agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera pulih kembali setelah selama lebih dari 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk dilanda krisis ekonomi dan politik yang begitu dahsyat. Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut.

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadap Partai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

Setelah dilantik menjadi Presiden, Gus dur dihadapi pada persoalan konflik di beberapa daerah di Indonesia. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan dirinya sebagai Presiden, Abdurrahman Wahid. melakukan pendekatan yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurrahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurrahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurrahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

<https://www.youtube.com/watch?v=M4GA3ybbk0o> (video dua tahun kepemimpinan gus dur)

Selama berkuasa Presiden Gus Dur dinilai gagal menjalankan pemerintahannya. Gus dur melakukan pemecatan anggota kabinetnya secara sepihak tanpa sepengetahuan wakil presiden, adanya kasus *bullog gate* dan *brunei gate*, yang secara tidak langsung melibatkan presiden Gus Dur, kasus ini menimbulkan memorandum I dan II oleh anggota DPR yang tidak diperhatikan oleh Presiden Gus Dur. Gus dur pada saat itu memberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono yang



menjadi Menkopalam, karena tidak mau mengumumkan keadaan darurat. Amien Rais yang saat itu menjadi ketua MPR mengatakan bahwa sidang istimewa MPR dapat dipercepat dari 1 Agustus menjadi 23 Juli 2001. Sebagai bentuk perlawanan kepada DPR, Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit pada tanggal 23 Juli 2001, yang isinya antara lain : (1) membekukan MPR RI dan DPR RI, (2) mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun, (3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru. Akan tetapi dekrit ini ditolak oleh DPR melalui mekanisme *votting* dalam Sidang Istimewa MPR, karena dianggap melanggar haluan negara.

<https://www.youtube.com/watch?v=ACNnW9hktYE> (video penjelasan gusdur mengenai posisinya saat dilengserkan dari Presiden)

Fatwa Mahkamah Agung juga menganggap dekrit tersebut tidak konstitusional, dimana kedudukan MPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Kemudian, berdasarkan hasil sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri.

Terpilihnya Megawati menjadi Presiden Indonesia ke lima Indonesia karena posisinya sebagai wakil Presiden Gus Dur yang dilengserkan berdasarkan hasil sidang istimewa MPR, sehingga otomatis beliau naik menjadi Presiden. Pada tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Megawati salah satunya membangun tatanan politik baru, yaitu dengan amandemen UUD 1945. Dengan selesainya amandemen keempat UUD 1945, tugas pemerintah selanjutnya melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundangan yang ada dengan muatan UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain pemerintah juga menyusun peraturan perundangan yang belum dimiliki, agar amanat konstitusi bisa dilaksanakan dengan baik. Perubahan UUD 1945 ini juga memuat tentang adanya upaya untuk menyetarakan lembaga-lembaga Negara, sehingga dapat mekanisme *check and balances* yang lebih memadai, demi mendorong demokratisasi lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004 nanti merupakan agenda baru dalam politik Indonesia. Indonesia mengalami beberapa kemajuan politik, karena Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan bertugas untuk masa jabatan yang pasti.

Pada pemerintahan Megawati pula pemilu secara langsung direncanakan pada tahun 2014. Langkah awal dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri tentang partai politik adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang No 3 tahun 1999 menjadi Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang partai politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sangat ketat, dengan demikian disiplin partai politik peserta pemilu sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU, dari 49 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, yang memenuhi syarat hanya 24 partai politik saja. Partai politik yang lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu pertama direalisasikan desentralisasi kewenangan yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada 5 Juli 2004 diadakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Megawati yang pada saat itu menjadi Presiden, kembali mencalonkan dirinya menjadi presiden berdampingan dengan K.H Hasyim Muzadi untuk menghadapi empat pasangan calon lainnya. Empat pasangan lainnya adalah Wiranto–Salahudin Wahid, Amien Rais–Siswono Yudohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz– Agum Gumelar. Hasil pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung dengan dua periode pemilu menghasilkan pemenang, Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Terpilihnya SBY sekaligus menandakan berakhirnya era Megawati sebagai Presiden Indonesia